

**ANALISIS DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) TERHADAP PEMILIK USAHA DI DESA
MARGAHAYU KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Trisma Himerlia Mawarni

**eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 8 , Nomor 2 , 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Terhadap Pelaku Usaha di Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengarang : Trisma Himerlia Mawarni

NIM : 1602025001

Program : S1 Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 17 November 2020

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Adam Idris M.Si
NIP. 19600114 198803 1 003

Pembimbing II,



Melati Dama, S.Sos, M.Si
NIP. 19820416 200501 2 016

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Pemerintahan	Program Studi Ilmu Pemerintahan
Volume :	
Nomor :	
Tahun :	
Halaman :	

ANALISIS DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PEMILIK USAHA DI DESA MARGAHAYU KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Trisma Himerlia M.¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak UMKM terhadap pemilik usaha di Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara . Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM terhadap pemilik usaha telah terselenggara, hal ini dilihat dari telah terselenggaranya indikator pemberdayaan masyarakat antara pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha lebih mencukupi dibanding sebelum memiliki usaha. Sudah mampu untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dengan baik. Hal ini dilihat dari pemilik usaha mampu untuk memberikan pendidikan tinggi untuk putra-putrinya setelah memiliki usaha ini. Mampu untuk merubah pola pikir mengenai status dan hak wanita dilingkungan keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Kemampuan Ekonomi, Kemampuan Mengakses Layanan Dasa, Kemampuan Mengubah Pola Pikir*

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014,

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: himerlia18@gmail.com

daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Asas desentralisasi merupakan salah satu asas yang mendasari otonomi daerah. Asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi ke desa bukan semata-mata tentang teknis administrasi atau praktik administrasi, tetapi dilihat juga berkaitan dengan demokrasi pada tingkat lokal yang arahnya pada pemberdayaan (*empowering*) dan kemandirian desa. Desentralisasi ke desa menjadi transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan atau kewenangan administratif dari pemerintah tingkat atas ke pemerintah tingkat desa.

Upaya Peningkatan kesejahteraan menurut Nurcholis (2011:4), masyarakat pedesaan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan anggaran dana yang tersedia melainkan juga pengentasan masalah kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia.

Kemiskinan di pedesaan merupakan suatu masalah pokok yang harus diselesaikan dan harus diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. (Bappenas,2018) Jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 13,20% atau secara absolute 15,81 juta jiwa dinyatakan sebagai indeks kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Bappenas, penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia didominasi oleh masyarakat yang hidup dipedesaan. Menurut Zakaria (2013:7) Desa juga identik dengan keterbelakangan dan penumpukan angkatan kerja produktif yang menganggur. Berdasarkan fakta diatas pemerintah semakin serius untuk menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan membangun desa.

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dapat dilakukan dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan yang diharapkan dalam pemberdayaan ini ialah mencipatakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, ataupun dalam bidang industri. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan dengan atau dukungan dari pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi yang dimiliki.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang ada di desa guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. UMKM yang dimiliki masyarakat dinilai mampu memberikan

dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. UMKM selain sebagai mata pencaharian, juga berperan penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang memiliki masih belum bekerja.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang dampak yang terjadi adanya pemberdayaan melalui UMKM ini terhadap pemilik UMKM. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul penelitian tentang “Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Terhadap Pemilik Usaha di Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Kerangka Dasar Teori

Pemberdayaan Masyarakat

Mubyarto dalam Awang (2010:46) bahwa pemberdayaan masyarakat ditekankan pada pemberdayaan manusia yang diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia terutama pada masyarakat desa, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada pasal 1, menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil

dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian yang dianggap dianggap sesuai dan mampu mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut sugiyono (2006:2) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Moloeng (2004:6) yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Kemampuan Ekonomi
- b. Kemampuan Mengakses Kesejahteraan dan Layanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan)

c. Kemampuan Mengubah Pola Pikir

Hasil Penelitian

1. Kemampuan Ekonomi

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Mengutip dari Schuler, dkk (dalam Suharto, 2004) untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Kemampuan ekonomi merupakan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Seseorang dikatakan berdaya ketika mampu meningkatkan kesadaran dan keinginan berubah serta meningkatkan dirinya untuk memperoleh akses seperti akses terhadap pendapatan.

Terdapat beberapa tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh BPD dalam proses perencanaan dan pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa. Pertama, Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa. Kedua, BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan. BPD akan mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Terdapat perbedaan penghasilan yang diperoleh dari masing-masing pemilik usaha. Hal ini dikarenakan berbedanya pemasaran produk yang dilakukan oleh pemilik usaha. Ada pemilik usaha yang hanya menjual produknya di dalam lingkungan desa saja dan ada juga yang sudah memasarkan produknya sampai menembus pasar modern. Pendapatan yang diperoleh pelaku usaha yang produknya dipasarkan di desa lebih kecil dibandingkan dengan produk yang dipasarkan ke pasar modern. Faktor lain yang juga mempengaruhi perbedaan penghasilan yang diperoleh masing-masing pemilik usaha adalah kurangnya informasi serta kurang aktifnya pelaku usaha dalam mencari informasi, sehingga mereka tidak memiliki banyak pengalaman untuk memasarkan produknya. Namun, salah satu dari pemilik usaha ini sangat aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Dinas Koperasi setempat sehingga banyak informasi yang beliau peroleh untuk lebih mengembangkan produknya.

Meskipun dengan penghasilan yang berbeda, masing-masing pelaku usaha mengaku bahwa sangat terbantu dengan adanya usaha yang mereka miliki.

Setelah memiliki usaha pengahasilan yang mereka peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

2. *Kemampuan Mengakses Kesejahteraan dan Layanan Dasar*

Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan. Pemberdayaan harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar terciptanya kemampuan untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri baik sandang, pangan maupun papan.

Sejak krisis moneter tahun 1997 sektor UMKM telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat dipandang sebagai media dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Mengutip dari Schuler, dkk (dalam Suharto, 2004) untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah masyarakat berdaya atau tidak. Seseorang dikatakan berdaya ketika mereka mampu meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses keterampilan, termasuk kemelekan huruf, status kesehatan dan gizi serta ada tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik.

Pemilik usaha ini mengaku kehidupannya jauh lebih baik ketika memiliki usaha. Selain membantu perekonomian, usaha ini juga membantu mereka dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sebelum memiliki usaha mereka hanya bersekolah hingga Sekolah Dasar, namun setelah memiliki usaha mereka mampu memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Bahkan anak dari salah satu pemilik usaha ini sedang melanjutkan study Pascasarjana di Surabaya. Selain itu, kebutuhan gizi juga tercukupi setelah memiliki usaha, pemilik usaha ini mampu untuk membeli ikan dan sayuran setiap harinya demi mencukupi kebutuhan gizi keluarga.

3. *Kemampuan Mengubah Pola Pikir*

Pola Pikir atau *mindset* adalah sekumpulan kepercayaan (*belief*) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. *Belief* menentukan cara berpikir, berkomunikasi dan bertindak seseorang. Dengan demikian jika ingin mengubah pola pikir, yang harus diubah adalah belief atau kumpulan *belief*

Kemampuan mengubah pola pikir merupakan kemampuan individu untuk mengubah cara pandang akan suatu kejadian atau suatu kondisi yang terajadi. Ketika seseorang mampu untuk mengetahui dan paham bagaimana memandang suatu kondisi misalnya dalam mengubah persepsi kesetaraan wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat menjadi indikator dalam melihat kemampuan individu dalam mengubah pola poikir. Ketika mampu untuk mengubah pola pikir maka pemberdayaan masyarakat telah memenuhi salah satu indikator pemberdayaan.

Untuk melihat kemampuan indikator ini penulis telah melakukan wawancara kepada pemilik *home industry* di Desa Margahayu.

Pemilik usaha ini terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Masing-masing mereka mampu mengubah pola pikir terhadap hak dan kewajiban wanita dalam keluarga. Mereka sependapat bahwa tidak ada perbedaan *gender* dalam melakukan usaha. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam berwirausaha. Ketika istri memiliki usaha bukan berarti mereka menyangi suami dalam memperoleh penghasilan, justru mereka membantu untuk mendapatkan penghasilan yang cukup agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, *mindset* mereka tentang pendidikan juga tidak lagi rendah, mereka berkeinginan untuk memberikan pendidikan yang tinggi bagi anak-anaknya. Tidak ada perbedaan baik anak laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan perannya dalam berbagai kehidupan masyarakat yang mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk mengaktualisasi dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan terkait Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan bahwa pemberdayaan melalui UMKM sudah berdampak pada upaya memperdayakan masyarakat hal ini dapat dilihat dari indikator pemberdayaan menurut Schuler dkk dalam Soeharto, 2004 sebagai berikut yaitu:

1. Kemampuan Ekonomi

Penghasilan yang mereka peroleh setelah memiliki usaha dan sebelum memiliki usaha jauh lebih baik setelah mereka memiliki usaha. Seperti yang disampaikan ibu Rosalina, beliau mengatakan bahwa pendapatan sebelum memiliki usaha hanya bergantung pada pekerjaan dari suaminya yang penghasilannya tidak menentu. Namun setelah memiliki usaha Ibu Rosalina mengaku mampu memperoleh penghasilan sekitar 5 juta setiap bulannya bahkan suaminya kini memilih untuk tidak bekerja lagi dan membantu Ibu Rosalina dalam memproduksi tempe. Begitu juga dirasakan oleh Ibu Marwati, beliau juga mengatakan bahwa penghasilan yang beliau miliki jauh lebih baik ketika memiliki usaha. Beliau yang berprofesi sebagai guru memiliki penghasilan sekitar 2 juta perbulan kini setelah memiliki usaha beliau mampu memperoleh penghasilan sekitar 9 juta perbulan dan mampu membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain. Namun hal berbeda disampaikan oleh Bapak Syafi'i, beliau mengatakan bahwa penghasilannya jauh lebih baik ketika sebelum memiliki usaha. Hal ini disebabkan karena faktor usia beliau yang saat memiliki usaha ini

sudah menginjak usia 69 tahun sehingga tenaga yang beliau miliki sudah berkurang. Beliau yang saat muda menjadi karyawan perusahaan batu bara dengan penghasilan sekitar 6 juta kini hanya memperoleh penghasilan 500 ribu dari hasil usahanya ini.

2. Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan dan Layanan Dasar

Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan merupakan kemampuan untuk mengakses pendidikan serta pelayanan kesehatan. Dalam kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, pelaku UMKM belum semua menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Masih ada pelaku usaha yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) hal ini dikarenakan faktor penghasilan keluarga yang pada saat itu masih kurang. Namun mereka berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka dengan harapan agar anak-anak memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Pendidikan ini memengaruhi perkembangan usaha yang dikelola. Ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan memiliki pemikiran yang lebih luas sehingga pandangan untuk mengembangkan usahanya juga akan berkembang. Selain pendidikan, kemampuan mengakses kesehatan juga penting. Dalam kemampuan mengakses pelayanan kesehatan semua pelaku UMKM mampu untuk mengakses kesehatan. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya riwayat penyakit yang mereka alami. Kondisi ini juga didukung dengan dekatnya akses menuju fasilitas kesehatan di desa sehingga setiap masyarakat mampu untuk mengecek kondisi kesehatan mereka secara berkala.

3. Kemampuan Mengubah Pola Pikir

Kemampuan mengubah pola pikir yang dimiliki para pelaku sudah mampu untuk menilai peran pria dan wanita dalam berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari mengubah persepsi dalam menghadapi dan mengubah kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat. Kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat tidak dijadikan sebagai hambatan. Mereka menjelaskan bahwa wanita dan pria tidak ada perbedaan dalam usaha keduanya memiliki kesempatan yang sama. Dalam keluarga pria dan wanita harus saling membantu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga tidak ada saling menjatuhkan antara pria dan wanita.

Saran

1. Pelaku UMKM yang masih belum berkembang usahanya perlu untuk menggali informasi lebih jauh informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM karena dinas ini yang memfasilitasi kegiatan kewirausahaan sehingga mereka mampu mengikuti berbagai macam pelatihan yang diadakan oleh

- Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi serta pengalaman yang dapat menjadikan pelaku usaha memiliki ide kreatif untuk mengembangkan usahanya dan lebih berani dalam mengabil resiko untuk kemajuan usahanya.
2. Pemilik UMKM sebagai salah satu bidang dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat sekitar untuk bergabung/bekerjasama dalam usahanya. Melihat tingginya angka yang belum bekerja di Desa Margahayu.
 3. Melihat jangkauan pemasaran beberapa produk dari UMKM yang masih sekitaran Desa margahayu, maka perlu adanya koordinasi antara pemilik usaha dengan dinas koperasi dan UMKM karena dinas ini akan membantu dalam proses pemasaran produk. Kemudian untuk pemerintah desa juga perlu untuk menjadi jembatan antara pelaku UMK dengan Dinas Koperasi dan UMKM mengingat para pelaku UMKM ini masih sangat minim informasi yang mereka peroleh dari Dinas.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Aprilia Theresia, K. S. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Alfabeta.
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. (2004). *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung : PT. Alumni
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Kartono, Kartini. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kwartono, M, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2007
- Moleong, L. J. (2004). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rivai veithzal. (2003). *Kepemimpinan Dan perilaku Organisasi*. Jakarta : PT Grafindo persada.
- Rohendi, T. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Soerjono Soekanto. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Totok Markidanto, P. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada.

Dokumen-dokumen:

- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Jurnal:

- Faturahman, B.M. (2018). Innovation of Local Government in Improving Food Security in Pacitan Regency. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMS)* 4(6), 70-75.
- Hendrik Okta. “*Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau*”. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1 (2) 2013
- Hermansyah. “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)*”. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 3 (2) 2015 : 351-362
- Kristanto Sony. “*Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau*”. *eJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Nopel Libut. 2015. “*Peran Kepala Desa Dalam Menggalang Partisipasi Masyarakat Desa Long Nawang Dalam Pembangunan fisik Di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu - Kabupaten Malinau*” *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2) 2015 : 823-836 ISSN 0000-0000.